# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Tinjauan Literatur

Bagian ini memuat literatur yang berhubungan dengan pembahasan dan permasalahan penelitian yang akan diteliti. Kajian literatur sangat penting untuk mengetahui penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat tiga literatur yang penulis gunakan sebagai referensi. Referensi tersebut bersumber dari artikel, jurnal, maupun buku yang berkaitan dengan kerjasama militer Jepang dan Amerika Serikat untuk mempertahankan Kepulauan Senkaku.

Tabel 2. 1 Literatur Review

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Judul | Penulis | Persamaan | Perbedaan |
| 1 | *Explaining stability in the Senkaku Islands dispute* | Fravel Taylor | Persamaan dalam penelitian ini adalaha membahas mengenai claim china terhadap jepang | Perbedaan dalam penelitian ini adalaha tidak adanya pembahasan tentang kerjasama jepang dan amerika |
| 2 | *China's Strategy in the Senkaku Islands Dispute: Issue Linkage and Coercive Diplomacy* | Krista E. | Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas sengketa pulau senkaku antara china dan jepang | Tidak adanya penjelasan mengenai cara kerjasama amerika dan jepang |
| 3 | *The U.S. Imperative on The Senkaku/Diaoyu Territorial Dispute* | Lieutnant Colonel Lynn J. Ishi | Persamaa dalam penelitian ini adalah membahas cara kerjasama jepang dan amerika | Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak menjelaskan secara detail reaksi china |

Pertama, artikel yang ditulis oleh Fravel pada tahun 2010 yang berjudul “*Explaining stability in the Senkaku Islands dispute.*”. Artikel ini berisi tentang China dan Jepang yang bertentangan mengenai kalim atas kedaulatan Kepulauan Senkaku. Jepang menegaskan bahwa pulau-pulau itu bertekad untuk tidak berpenghuni dan *terra nullius* (sebagai tanah kosong) pada tahun 1886 dan didirikan Jepang secara resmi pada tahun 1895. China melakukan klaim penemuan pulau-pulau di bawah Ming dinasti dan menyatakan secara tegas bahwa pulau-pulau tersebut diserahkan ke Jepang bersama dengan Taiwan di Perjanjian Shimonoseki tahun 1895 dan setelah itu kembali ke Tiongkok pada akhir Perang dunia II. Namun, dari tahun 1945 hingga 1972, Amerika Serikat menetapkan pulau-pulau yang tadi disebutkan sebagai bagian dari Kepulauan Ryukyu (termasuk Okinawa). Maka dari itu hasil dari Perjanjian Pengembalian Okinawa adalah pulau-pulau tersebut dikelola oleh Jepang sejak Mei 1972. China (Republik Rakyat China) menyatakan klaim resmi pertama atas pulau-pulau tersebut pada bulan Desember 1970, setelah Taiwan (atas nama Republik Tiongkok) dan Jepang sama-sama mengeluarkan klaim dalam upaya untuk memastikan akses ke sumber daya minyak terdekat.

Kedua, pada jurnal yang ditulis oleh Krista pada tahun 2009 yang berjudul “*China's Strategy in the Senkaku Islands Dispute: Issue Linkage and Coercive Diplomacy*” berisi tentang China yang terus mendesak klaim kedaulatan atas pulau-pulau dan perairan sekitarnya karena kawasan sengketa tersebut disebutkan memiliki sumber daya alam seperti minyak dan gas alami yang melimpah, mirip dengan Kepulauan Spratly yang memiliki masalah sengketa daerah Laut China Selatan. Perkiraan 2005 sumber daya minyak di Laut Cina Timur adalah 100 hingga 200 miliar barel, cukup untuk menyediakan sumber energi bagi kedua negara selama 50-80 tahun.  Akses ke sumber daya minyak merupakan prioritas penting bagi China merupakan konsumen minyak terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Terlepas dari perjanjian pengembangan gas bersama Juni 2008 di perairan di luar zona yang disengketakan, China terus mengklaim kedaulatan pulau-pulau itu dan perselisihan itu hampir tidak dapat diselesaikan.

Pada literatur ketiga ini berjudul “*The U.S. Imperative on The Senkaku Territorial Dispute*” yang ditulis oleh Lieutenant Colonel Lynn J. Ishii, di Amerika Serikat pada tahun 2013. Literatur ini menjelaskan bagaimana bisa terjadinya pemicu awal konfrontasi dari China yang semakin intensif pada tahun 2012. Diawali dengan Pemerintah Tokyo meengumumkan tentang rencananya untuk mengumpulkan dana pribadi untuk mengakuisisi tiga dari Kepulauan Senkaku, pada April 2012. Pemerintah Tokyo melakukan ini sebagai taktik politik untuk mempermalukan Pemerintah Noda, menunjukkan bahwa pemerintahan Noda tidak cukup tegas untuk menegakkan kedaulatan Jepang. Selanjutnya, pada September 2012, Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda menasionalisasi tiga pulau Senkaku terbesar (Uotsuri, Kita-Kojima, dan Minami-Kojima). Niat Perdana Menteri Noda adalah untuk mencegah Shintaro menggunakan pulau-pulau untuk memprovokasi konfrontasi di masa depan dengan China. Namun demikian, tindakan ini memprovokasi China untuk menegaskan kedaulatannya atas pulau-pulau dan meningkatkan demonstrasi anti-Jepang.

Di sisi lain, Amerika Serikat menyaksikan perkembangan gejolak antara China dan Jepang dengan teliti. Bagaimanapun, Amerika Serikat memiliki perjanjian pertahanan bersama dengan Jepang. Kebijakan ini terkonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri, Hillary Clinton pada 27 Oktober 2010 yang menyatakan bahwa "Senkaku termasuk dalam cakupan Pasal 5 tahun 1960 A.S. Perjanjian Kerjasama dan Keamanan Jepang. Jika China menggunakan kekuatan untuk melawan Jepang, Amerika Serikat harus memenuhi kewajiban perjanjiannya dan bekerjasama untuk mejaga pertahanan Jepang.

## 2.2 Kerangka Teoritis

Teori merupakan sebuah sistem ataupun suatu konsep yang mana menyatakan adanya suatu hubungan yang berkaitan pada beberapa konsep yang ada dan akan membantu manusia untuk paham akan sebuah fenomena. Menurut Jonathan Turner, teori merupakan suatu proses pengembangan beberapa ide yang membantu manusia menjelaskan alasan dan proses suatu peristiwa dapat terjadi (Richard, 2008).

Kerangka teoritis sendiri terbuat dari konsep dan beberapa teori yang telah ada dan berguna untuk studi kasus khusus. Kerangka teori diharuskan menunjukkan pemahaman mengenai teori dan konsep yang berkaitan dengan topik penelitian, lalu akan menghubungkannya dengan bidang pengetahuan yang lebih luas pada masalah – masalah yang akan dibahas. Peneliti harus memeriksa kembali bab-bab tertentu dan literatur penelitian terkait untuk menemukan teori dan model analisis yang relevan dengan masalah penelitian yang diteliti. Pilihan teori harus bergantung pada penerapannya, kemudahan penggunaan dan kekuatan penjelasannya  (Orrico, 2021).

### 2.2.1 Hubungan Internasional

Bidang hubungan internasional telah hadir pada abad ke-20 sebagian besar di Barat dan khususnya di Amerika Serikat ketika negara itu tumbuh dalam kekuatan dan pengaruh. Sedangkan studi hubungan internasional di Uni Soviet yang baru didirikan dan kemudian di Cina komunis dilumpuhkan oleh ideologi Marxis yang dipaksakan secara resmi, di Barat bidang tersebut berkembang sebagai hasil dari sejumlah faktor: meningkatnya permintaan untuk menemukan cara yang tidak terlalu berbahaya dan lebih efektif untuk melakukan hubungan antara masyarakat, masyarakat, pemerintah, dan ekonomi; lonjakan penulisan dan penelitian yang diilhami oleh keyakinan bahwa pengamatan dan penyelidikan sistematis dapat menghilangkan ketidaktahuan dan melayani perbaikan manusia; dan mempopulerkan urusan politik, termasuk urusan luar negeri.

Pandangan tradisional bahwa masalah-masalah asing dan militer harus tetap menjadi milik eksklusif para penguasa dan elit lainnya menghasilkan keyakinan bahwa masalah-masalah tersebut merupakanperhatian dan tanggung jawab yang penting dari semua warga negara. Meningkatnya popularitas hubungan internasional memperkuat gagasan bahwa pendidikan umum harus mencakup instruksi dalam urusan luar negeri dan bahwa pengetahuan harus dimajukan untuk kepentingan kontrol publik yang lebih besar dan pengawasan kebijakan luar negeri dan militer (McClelland *et. al.* 2022).

### 2.2.2 Politik Internasional

Politik internasional merupakan perebutan kekuasaan, menempatkan kekuasaan (*power*) sebagai konsep sentral. Perjuangan memperoleh kekuasan merupakan salah satu tujuan dari politik internaisonal. Akan tetapi, tujuan sebenarnya suatu politik internasional adalah kekuasaan. Adapun pengertian lain dari Politik Internasional, yaitu studi tentang beberapa aspek Hubungan Internasional yang mencakup konflik dan kontroversi di tingkat internasional dan penyelesaiannya (Mochtar, 1991).

Pada kebijakan politik internasional dijelaskan mengenai keputusan atau *decision.* *Decision* merupakan suatu keputusan yang nantinya akan di dapatkan dari beberapa pilihan yang tertera. Keputusan tersebut dapat didapatkan dari referensi ataupun dapat melalui pengetahuan tentang segala akibat yang dapat ditimbulkan oleh kehidupan bernegara-bangsa terhadap entitas luar - atau negara lain - dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (hubungan internasional) . Suatu negara dapat menelusuri kebijakan politik internasional dari para pembuat keputusan, bisa dari pemimpin negara maupun kelompok pengambil keputusan tergantung pada masalah tertentu, walaupun mungkin juga untuk menganalisisnya dari sekelompok orang biasa (Renny, 2020).

Waltz mengklasifikasikan beberapa level analisis dalam politik internasional, yaitu: level manusia (image pertama) dan negara (image kedua) yang keduanya disebut pendekatan reduksionis, ketiga level internasional (image ketiga), dikenal dengan pendekatan sistem. Prinsip pengaturan sistem politik internasional adalah setiap unit berdiri dalam posisi yang sama tanpa adanya otoritas sentral (anarki) dan memiliki kewenangan mengatur kepentingan masing- masing (desentralisasi) sehingga pola hubungan bersifat koordinasi. Dalam konteks fungsi unit, menurut Waltz fungsi negara sebagai unit sistem internasional pada kadar minum adalah mempertahankan eksistensinya atau keselamatannya (*preservation*) dan pada kadar yang maksimum adalah dominasi dunia. Dari dua fungsi tersebut, menurut Waltz motif utama perilaku unit baik dalam konteks domestik maupun internasional adalah keberlangsungan eksistensinya (*survival*), yang merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan lainnya (Hakim, 2022).

### 2.2.3 Konflik

Konflik merupakan setiap situasi ataupun suatu proses pada saat ada dua atau lebih dari dua entitas sosial berhubungan secara psikologis antagonis atau adanya suatu interaksi antagonistik yang terjadi dan menegaskan bahwa antagonisme (yang untuk momen tetap tidak terdefinisi) adalah elemen umum dalam semua konflik, ada beberapa berbagai jenis antagonisme psikologis (misalnya tujuan yang tidak sesuai, saling eksklusif kepentingan, permusuhan emosional, perbedaan faktual atau nilai, permusuhan tradisional, dll.) dan angka dari berbagai jenis interaksi antagonis (mulai dari yang paling langsung, kekerasan, dan perjuangan yang tidak diatur ke bentuk timbal balik yang paling halus, tidak langsung, dan sangat diatur campur tangan). Konflik memiliki arti lain, yaitu ketidaksesuaian kepentingan, nilai, tuju, harapan, kebutuhan, dan kosmologi sosial (ataupun ideologi). Organisme terikat di berbagai konfigurasi konflik dan koalisi, dengan dinamika dan logikanya sendiri (dennen, 2005).

#### 2.2.3.1 Konflik Jepang-China dalam Klaim Pulau Senkaku

Sebuah kepulauan yang tidak berpenghuni merupakan sebutan bagi Kepulauan Senkaku. Akan tetapi, setelah penelitian panjang tentang keberadaan sumber daya alam, terutama minyak, di Kepulauan Senkaku pada tahun 1970, masalah sengit dimulai antara Jepang dan China.

Menteri Luar Negeri Jepang mengumumkan pendapatnya pada tanggal 8 Maret 1972. Pengumuman tersebut isinya mengenai beberapa poin hak-hak atas kepemilikan Kepulauan Senkaku. Hasil pengumumannya berjumlah 6 poin, diantaranya: (1) Kepulauan Senkaku merupakan sebuah Kepulauan yang tidak ada pemiliknya sejak tahun 1885-1895. (2) Pada 14 Januari 1895, wilayah territorial Jepang mengikutsertakan Kepulauan Senkaku ke dalamnya atas keputusan Pemerintah Jepang. (3) Perjanjian Shimonoseki pasal 2 tidak memasukkan Kepulauan Senkaku ke dalam perjanjiannya. (4) Kepulauan Senkaku dijadikan sebuah area yang ada di bawah kekuasaan dan kekuatan Okinawa dan hal tersebut dilakukan secara sah sesuai dengan Perjanjian Okinawa pada tahun1971. Kemudian yang terakhir (5) pada tahun 1952-1970, China telah menyatakan setuju perihal status Kepulauan Senkaku yang mana merupakan bagian dari area kedaulatan Jepang. Selanjutnya, Jepang menyatakan bahwa selain adanya klaim dari China atas Kepulauan Senkaku, Jepang pun menyatakan sebuah pengakuan yang pertama atas Kepulauan Senkaku melalui berbagai macam aksi sebelum Perang Dunia II.

### 2.2.4 Politik Luar Negri

Politik luar negri adalah suatu kumpulan dari kebijakan satu negara untuk mengatur hubungan-hubungan luar negerinya. Politik Luar Negri adalah bagian atas kebijakan bersifat nasional yang bertujuan untuk mengabdi kepada tujuan-tujuan yang ditetapkan khususnya untuk tujuan dan kurun waktu tertentu (Sumpena, 1984).

#### 2.2.4.1 Politik Luar Negri Jepang

Politik luar negeri jepang diawali saat era Restorasi Meiji, saat masa itu Jepang mengawali politik luar negerinya dengan cara membuka hubungan dengan negara Barat. Pada mulanya Jepang menganut sistem politik yang tertutup yang mana tidak berhubungan dengan negara lain. Bermula pada saat Restorasi Meiji, Jepang mulai membuka pintu dan melakukan industrialisasi daengan negara Barat.

Suatu negara dalam menjalankan politik luar negerinya harus mempunyai beberapa prinsip dasar atau pedoman umum yang menjadi acuan dalam membuat suatu kebijakan luar negeri. Tentu saja, dasar-dasar kebijakan luar negeri berbeda dari satu negara ke negara lain, karena kepentingan nasional dan cara masing-masing negara mencapainya pasti berbeda. Demikian pula Jepang juga dalam politik luar negerinya memiliki pedoman dasar, pedoman dasar tersebut dijadikan landasan dan tujuan negaranya. Pedoman tersebut kemudian akan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara. Prinsip dasar politik luar negeri Jepang yang diambil Kementerian Luar Negeri (MOFA) antara lain:

1. Memperkuat posisi Jepang di mata internasional terutama untuk stabilitas perekonomian dan bersama-sama dengan dunia internasional menjaga perdamaian dan keamanan dunia sesuai Konstitusi Jepang. Jepang merupakan negara dengan sumber daya alam yang sangat terbatas, namun di satu sisi karena industrialisasi yang maju, Jepang membutuhkan bahan baku untuk menjalankan industrinya. Dalam tatanan dunia saat ini di mana negara-negara saling bergantung, Jepang memanfaatkan hal ini dengan bekerja sama dengan negara lain untuk menstabilkan perekonomian. Selain itu, Jepang juga aktif menerapkan Konstitusi Jepang yang bersifat anti-damai yang diundangkan setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Yoshida Shigeru.
2. Bekerja sama dalam bidang politik dan ekonomi untuk menghindari konflik. Jepang memandang ekonomi dan politik adalah dua hal yang saling bergantung, dan konflik politik seringkali muncul karena alasan ekonomi atau sebaliknya. Konflik-konflik yang muncul menjadi perhatian tersendiri bagi Jepang karena dianggap hanya menimbulkan permasalahan di luar permasalahan utama, seperti pengungsi yang akan muncul akibat konflik tersebut.
3. Jepang perlu memainkan peran aktif dalam perdamaian dan keamanan internasional serta meningkatkan kekuatan ekonominya. Jepang jelas menyadari bahwa ketika ingin berpartisipasi aktif dalam perdamaian dan keamanan internasional, maka harus mempunyai kekuatan atau otoritas yang memungkinkan negara lain atau khususnya dunia internasional untuk mengakui dan mentransformasikannya.
4. Diplomasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik luar negeri. Jepang selalu mengedepankan perdamaian dan keamanan, hal ini juga tercatat dalam Konstitusi negaranya. Namun bukan itu saja: Jepang terus berupaya menjalin hubungan dengan negara lain melalui diplomasi dan kerja sama. (Kementerian Luar Negeri, 2018).

### 2.2.5 Kerjasama

Kerjasama adalah kerja untuk mencapai satu tuju bersama-sama. Dalam situasi kerjasama, individu mencari hasil yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bermanfaat untuk semua anggota kelompok lainnya. Kerjasama atau aliansi negara merupakan suatu kumpulan dari macam-macam negara yang bertujuan untuk memenuhi tujuannya akhir (Joshua, 1994). Kerjasama militer atau aliansi militer memiliki perbedaan bentuk. Kerjasama terdapat dua macam, yaitu: (1) *Collective Security* yang artinya bentuk perjanjian yang isinya tidak termasuk suatu perjanjian dimana satu negara dapat diserang oleh negara lainnya yang membuat negara lain akan ikut melakukan pembelaan. (2) *Collective Defense* merupakan kerjasama militer yang mengikutsertakan perjanjian untuk menghadapi musuh. (Craig Synder, 1999)

#### 2.2.5.1 Kepentingan Amerika-Serikat di Pulau Senkaku

Amerika Serikat memiliki berbagai kepentingan di Kepulauan Senkaku, beberapa diantaranya adalah untuk menjaga dan melindungi stabilitas di kawasan Asia Timur, yang meliputi Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan beberapa negara lain yang menjadi sekutu Amerika Serikat setelah Perang Dunia II. Antara 2012 dan 2015, komposisi polisi politik internasional berubah, dan periode ini ditandai dengan munculnya masalah keamanan baru. Keadaan ini mendorong Jepang mengubah arah pertahanannya dari pasif menjadi aktif. Situasi ini juga mempengaruhi hubungan antara Jepang dan Amerika Serikat. Jepang mendukung keberadaan Amerika Serikat melalui bantuan teknis, khususnya melalui revitalisasi lima pangkalan militer AS di Jepang, antara lain Sasebo, Nagasaki, Okinawa, China, dan Kanagawa, untuk memaksimalkan mobilisasi dan pengamanan pasukan AS.

Kepentingan Amerika Serikat di Pulau senkaku yaitu mengirim kapal untuk perang dan helikopter untuk melakukan patroli di daerah kepulauan senkaku dengan alasan sebagai aksi atau upaya penyelamatan *freedom of navigation* di area sengketa. Hal tersebut dilaporkan merupakan suatu cara dan juga rencana untuk China supaya menimbang ulang klaim-nya atas pulau Senkaku. Amerika Serikat juga ingin agar lalu lintas perdagangan jalur komunikasi terjamin di wilayah laut yang penting ini mengingat hampir dua pertiga perdagangan dunia melewati kawasan ini.  Amerika Serikat juga memiliki kepentingan politik yaitu ingin meyakinkan China bahwa awal keterlibatan di panggung dunia, baik juga bagi China jika mematuhi hukum Internasional dalam upaya mencapai Ambisi nya. Amerika Serikat percaya jika China diizinkan mengintimidasi negara-negara tetangga nya dan menetapkan klaim baru atas pulau Senkaku itu akan membuat situasi Asia dan dunia menjadi bimbang.

Amerika Serikat berpendapat tegas bahwa China melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan klaim atas Kepulauan Senkaku secara sepihak. Oleh karena itu, apabila China tidak berniat merubah perlakuannya, AS pun tidak akan membiarkan China meneruskan ancaman atas kedaulatan Jepang dengan kekerasan dan menggunakan aksi yang tidak sesuai dengan hukum internasional.  Hal tersebut berarti keterlibatan Amerika Serikat pada konflik Pulau senkaku merupakan bagian dari upaya mewujudkan kepentingan nasional Amerika Serikat.  meskipun Secara geografis posisi kepulauan senkaku tidak berhubungan dengan Amerika Serikat, namun pada kenyataannya terdapat beberapa kepentingan untuk negara Amerika Serikat ini di daerah wilayah laut Tiongkok Selatan, yang mana berkaitan dengan posisi Jepang (Adinda, 2017).

### 2.2.6 Self Defence Force Jepang

Pada tahun 1954 ada pasukan *Self Defence Forc*e Jepang yang sebelumnya bernama *National Safety Force*. Tujuan SDF ada perubahan dari yang awalnya hanya menjaga pertahanan internal Jepang, lalu menjadi alat pertahanan dari gangguan internal dan eksternal. *Self Defence Force* (SDF) terbagi menjadi 3 unit yaitu *Ground Self Defence Force* (Rikujoo Jietai), *Maritim Self Defence Force* (Kaijo Jietai), dan *Air Self Defence Force* (Kokku Jieitai). (Kedutaan Besar Jepang, 1985).

## 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritis dan permasalahan yang telah ada, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis sebagai berikut.

“Kerjasama Jepang dan Amerika sampai saat ini dapat mempertahankan kepemilikan jepang atas pulau senkaku, hal itu dapat menjadi model kerjasama serupa dalam kasus sengketa yang lain”

## 2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Tabel 2. 2 Verivikasi Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel**  **(teoritik)** | **Indikator**  **(Empirik)** | **Verifikasi**  **(Analisis)** |
| Variabel bebas:  Adanya klaim China terhadap Pulau Senkaku Jepang | “*East China Sea Air Defense Identification Zone* (ECS ADIZ) Tahun 2013” | Terjadi masalah sengketa di Pulau Senkaku karena adanya claim China atas pulau tersebut dengan adanya “*East China Sea Air Defense Identification Zone* (ECS ADIZ)” China melakukan claim secara sepihak dan melalui ruang udara di atas Kepulauan Senkaku yang berdasarkan status quo terakhir berada di ADIZ Jepang  *Sumber : Kimberly Hyu, 2014, “Air Defense Identification Zone Intended ti Provide China Greater Flexibility to Enforce East China Sea Claims, U.S-China Economic and Security Commission* |
| Variabel terikat:  Maka kerjasama jepang dan Amerika serikat | 1.*San Fransisco Treaty* (1951)  2.*Japan-US Security Treary*  (1960)  3. *Security Consultative Committee*  (2013) | Beberapa pertemuan yang dilakukan oleh Jepang-Amerika Serikat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dan kerjasama baru. *San Fransisco Treaty,* Security Treaty (*U.S.-Japan Security Treaty*) tahun 1951 direvisi dengan terbentuknya Japan-US Security Treaty 1960, Treaty Of Mutual Cooperation And Security Between Japan and The United States of America. Lalu pada tahun 2013 terlahir (SCC)  Sumber : Listian, Elli, and Erna Kurniawati. "Perpanjangan Aliansi Keamanan Jepang-Amerika Serikat Pada Tahun 2013 (Perspektif Jepang)." *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan* 19.2 (2018). |

## 2.5 Skema dan Alur Penelitian

## 

Klaim China

Klaim Jepang

Permasalahan sengketa Pulau Senkaku

China melakukan tindakan agresif

Kerjasama militer Jepang dan Amerika Serikat

ddd

Gambar 2. 1 Skema dan Alur Penelitian